

INSULARITAS DAN KETERBELAKANGAN EKONOMI WILAYAH MENUJU MODEL KONSEPTUAL PERKEMBANGAN WILAYAH PULAU KECIL DI INDONESIA

oleh
R. Rijanta

Staf Pengajar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

INTISARI

Insularitas dan keterbelakangan ekonomi wilayah merupakan dua fenomena yang hampir selalu hadir berdampingan di berbagai belahan dunia, dengan menyisakan sedikit perkecualian. Optimisme yang berlebihan untuk pembangunan wilayah berbasis sumberdaya kelautan dalam konteks Indonesia pada saat krisis telah tumbuh di kalangan akademisi, praktisi maupun pengamat di bidang kelautan. Bahkan dalam era otonomi daerah, sebagian sumberdaya laut telah mengalami salah urus atau pemanfaatan berlebih atas nama otonomi dan peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran teoretik tentang hubungan antara insularitas dan pembangunan. Hubungan antara insularitas dan keterbelakangan wilayah akan disajikan dalam suatu model konseptual berdasarkan kajian tentang kondisi empirik yang diperoleh dari studi-studi terkait baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Metode yang dipergunakan dalam analisis ini meliputi penelusuran dan penelaahan literatur dan sumber-sumber lain yang relevan serta tersedia on-line dalam berbagai situs di internet. Literatur yang dikaji meliputi publikasi berbentuk buku, laporan penelitian, dan jurnal baik yang tersedia dalam bentuk cetakan maupun yang tersedia on-line.

Wilayah pulau-pulau kecil mengalami keterbelakangan ekonomi karena takdir kondisi fisik wilayah yang tidak memungkinkan bekerjanya elemen-elemen sosial, politik dan demografi serta keruangan secara sinergis dalam pembangunan. Setiap elemen wilayah bahkan cenderung bekerja saling negasi terhadap elemen lainnya, sehingga dalam upaya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil banyak sekali dilema dan paradoks yang tidak mudah dicari komprominya. Model yang dibangun pada bagian akhir penelitian ini dilandasi suatu asumsi determinisme lingkungan yang berlaku di wilayah pulau-pulau kecil. Faktor fisik wilayah merupakan kendala terbesar yang menurunkan berbagai masalah pembangunan di wilayah pulau kecil. Model yang dibuat berusaha menunjukkan keterkaitan antarelemen tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan terjadinya keterbelakangan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil. Dari model ini dapat diperoleh pelajaran bahwa pembangunan wilayah pulau-pulau kecil hendaknya menempatkan keberlanjutan kehidupan wilayah dan integritas ekologis sebagai tujuan terpenting. Orientasi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tampaknya harus ditempatkan pada prioritas yang rendah.

PENDAHULUAN

Meskipun pernyataan resmi pemerintah tentang ketertinggalan provinsi-provinsi dengan tingkat insularitas yang tinggi sudah dibuat pada tahun 1990 (Riwanto Tirtosudarmo, 1998), pembicaraan tentang pembangunan wilayah kepulauan baru dalam beberapa tahun terakhir ini memperoleh perhatian yang besar dari kalangan politisi, pengamat politik, akademisi, peneliti maupun para praktisi dunia usaha di bidang kelautan. Pembicaraan menjadi semakin gencar ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi sejak tahun 1997. Banyak harapan yang bernada optimistik yang menyatakan bahwa pendapatan dari eksploitasi sumberdaya kelautan secara besar-besaran diperkirakan akan dapat mengembalikan kondisi ekonomi seperti semula. Bahkan terlontar pula kecaman dan kritikan tajam yang cenderung mempersalahkan pemerintah yang selama ini dianggap telah mengabaikan pembangunan di sektor kelautan. Terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dalam sengketa teritorial antara Indonesia dan Malaysia semakin membuktikan bahwa terjadi kelalaian dalam penegakan kedaulatan di wilayah-wilayah terpencil dan biasanya juga terbelakang secara sosial-ekonomis. Sebagian lain dari perdebatan menyoroti kesenjangan antara bagian barat dan timur Indonesia yang memang sebagian juga disebabkan oleh perbedaan tingkat insularitas wilayah yang menghasilkan perbedaan dalam hal kompleksitas masalah pembangunan yang dihadapinya (Jones et al, 1998).

Sebagian besar perdebatan yang terjadi pada tataran politis seperti di atas sebenarnya tidak selalu didasarkan pada realitas empirik. Beberapa di antara pendapat yang optimistik cenderung bersifat intuitif atau bahkan spekulatif dan dengan mendasarkan argumentasinya secara subjektif bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut atau Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, tanpa didasari kajian-kajian yang mendalam tentang wilayah kepulauan itu sendiri beserta konsekuensinya dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu realitas objektif memang menunjukkan adanya kontribusi ekonomi kelautan yang masih amat kecil dibandingkan potensi yang ada (Biagini and Hoyle, 1999). Kontribusi sub-sektor perikanan dalam ekonomi regional beberapa wilayah provinsi yang didominasi wilayah laut baru mencapai angka kurang dari 20 persen (Hayes, et al. 1998). Kondisi semacam inilah yang lalu digeneralisasikan untuk mendukung argumen bahwa potensi kelautan Indonesia masih sangat besar tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Generalisasi teoretik semacam ini sebenarnya memiliki kelemahan yang cukup mendasar dalam konteks wilayah kepulauan termasuk Indonesia, karena secara nasional kondisi potensi kelautan yang ada sebenarnya sangat beragam dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tingkat eksploitasi yang berbeda-beda pula. Di satu tempat potensi pengembangan masih tersedia cukup besar, tetapi di tempat yang lain sudah tidak tersedia lagi potensi pengembangan yang cukup akibat kerusakan lingkungan dan pemanfaatan yang tidak lestari. Bahkan beberapa tempat sudah mengalami pengurasan sumberdaya

Salah satu faktor penting yang diduga kuat menentukan tingkat perkembangan wilayah kepulauan adalah tingkat insularitas wilayah yang berbeda-beda antarbagian dalam wilayah kepulauan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat insularitas wilayah kepulauan, semakin berat permasalahan yang dihadapinya dalam pembangunan sehingga sebagian besar wilayah dengan tingkat insularitas yang tinggi cenderung berkembang sebagai wilayah tertinggal (Benedict, 1967). Pembuktian terhadap kebenarannya secara empirik memerlukan untuk meluruskan berbagai spekulasi optimistik di atas secara proporsional, sehingga harapan-harapan yang berlebihan terhadap pengembangan ekonomi kelautan dapat dibuat lebih rasional. Hal ini perlu dilakukan karena bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang terlalu bersemangat untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan yang dimilikinya dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sementara lingkungan wilayah pulau kecil dan ekosistem pantainya merupakan bagian wilayah yang paling rentan terhadap gangguan-gangguan lingkungan. Kerusakan lingkungan pantai yang terjadi di wilayah kepulauan akan memiliki dampak kerusakan ekologis yang luas, tidak mudah dan tidak cepat terpulihkan.

Berbagai pengalaman empirik dari literatur internasional justru menunjukkan bahwa wilayah kepulauan merupakan wilayah yang memiliki banyak masalah baik kerentanan kondisi fisik alamiah, sosial-budaya, politik, ekonomi, maupun demografis, meskipun ada juga bukti-bukti beberapa wilayah insuler yang sangat progresif perkembangannya. Sangat menarik untuk disimak pernyataan Briguglio (2001) dalam suatu pertemuan ilmiah mengenai perdagangan bebas dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara kepulauan yang dilaksanakan di Jamaica. Kebanyakan negara kepulauan memang tidak memiliki pendapatan per kapita yang sangat rendah. Ini memberi kesan adanya kekuatan ekonomi yang besar pada negara-negara di wilayah kepulauan, sehingga menutupi kelemahan riil yang sebenarnya ada yaitu kerentanan ekonomi, ekologi dan kebergantungan yang tinggi pada lingkungan yang tidak terkendalikan (*uncontrolable environment*).

Pernyataan resmi pemerintah Indonesia tentang keterbelakangan wilayah provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia dibandingkan Indonesia Barat pertama kali muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Suharto pada Januari 1990. Pemerintah berpendapat bahwa pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus ditingkatkan agar ketimpangan yang ada dapat dikurangi. Sejak itulah kemudian muncul perhatian yang lebih besar dalam bentuk pembicaraan dan diskusi mengenai pembangunan di KTI (Cosmas Batubara, 2003). Demikian juga program transmigrasi mengarahkan pengiriman transmigran ke kawasan ini. Selebihnya dibentuk Dewan Pertimbangan Nasional Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang diketuai Menteri Riset dan Teknologi. Cakupan Kawasan Timur Indonesia meliputi seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang juga dikritik karena sebenarnya ada pandangan umum yang dimaksud Kawasan

Keterbelakangan sebagian besar KTI yang memiliki derajat insularitas relatif tinggi diduga kuat berhubungan erat dengan sifat-sifat insularitasnya itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wilayah kepulauan selain mengandung potensi sumberdaya kelautan seperti dikemukakan di atas, sekaligus juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai gejolak sistem ekologis, fisik alamiah, ekonomi, sosial-budaya, maupun politiknya. Sebagai konsekuensinya eksploitasi sumberdaya pada wilayah insuler dalam rangka pembangunan justru harus mengedepankan aspek-aspek konservasi lingkungan daripada aspek-aspek ekonominya. Selain itu keragaman pengalaman internasional juga perlu dikaji sebagai pembanding melihat kondisi empirik Indonesia saat ini.

TUJUAN

Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran awal yang utuh mulai dari kajian teoretik sampai keragaman pengalaman empirik mengenai hubungan antara insularitas dan tingkat perkembangan wilayah di Indonesia. Berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik tersebut disusun sebuah model konseptual sebagai generalisasi hubungan antarkomponen yang menentukan terjadinya keterbelakangan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan penelaahan pustaka dan menggunakan data dari laporan-laporan penelitian di Provinsi Maluku, Kepulauan Natuna, dan Pulau Seram. Selain itu dimanfaatkan juga sumber-sumber sekunder yang tersedia di berbagai situs internet yang relevan. Di antara sumber-sumber *website* yang dipandang penting adalah Euroisles dan SIDSnet (*Small Island Developing States Net*) sebagai pembanding dalam memahami fenomena empirik di Indonesia. Pembahasan aspek-aspek teoretik dilakukan berdasarkan berbagai literatur dan jurnal internasional yang tersedia dalam bentuk cetakan maupun yang hanya dapat diakses secara elektronik. Kajian teoretik tentang wilayah insuler didasarkan pada buku yang ditulis oleh Briguglio (2001) dan beberapa publikasi dalam jurnal *Tijdschrief voor Economie en Sosial Geografie*, *World Development*, *The Geographical Journal* maupun *Scottish Geographical Magazine* yang menerbitkan artikel-artikel tentang wilayah insuler. Hal ini terutama dilakukan untuk memperoleh informasi tentang konsep dan definisi insularitas maupun keterkaitannya dengan keterbelakangan wilayah dari berbagai sumber.

Kajian aspek empirik perkembangan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil didasarkan pada beberapa hasil penelitian yang sudah ada. Keragaman pengalaman dari berbagai wilayah pulau kecil di Indonesia dikaji untuk mengenali pola umum untuk menarik generalisasi tentang hubungan antara berbagai komponen penentu perkembangan ekonomi wilayah pulau kecil. Hasil kajian hubungan antarkomponen penentu keterbelakangan wilayah disajikan secara visual dalam bentuk diagram pada bagian akhir hasil penelitian.

INSULARITAS DAN DINAMIKA WILAYAH INSULER SEPANJANG SEJARAH

Pulau didefinisikan sebagai suatu daratan yang sepenuhnya dikelilingi oleh tubuh air dengan ukuran yang lebih kecil dari wilayah kontinen. Selain itu dalam definisi Euroisles (2003) ditambahkan lagi bahwa sebuah pulau juga dihuni setidaknya oleh 50 orang, tidak dihubungkan ke wilayah kontinen dengan prasarana permanen seperti terowongan atau embatan, berjarak setidaknya 1 kilometer dari wilayah kontinen dan tidak memiliki kota yang besar. Dengan demikian insularitas secara morfologis adalah kondisi wilayah pulau yang dicirikan dengan ukuran yang kecil secara fisik dan jarak yang jauh dari wilayah kontinen (Biagini and Hoyle, 1999). Hal ini juga sejalan dengan definisi wilayah pulau yang dikeluarkan oleh PBB yang menyatakan bahwa sebuah pulau adalah wilayah yang terbentuk secara alamiah dan dikelilingi oleh tubuh air dan pemukaannya lebih tinggi daripada pasang tertinggi (Euroisles, 2003).

Dalam konteks Indonesia, menurut dokumen resmi Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2002) pulau kecil didefinisikan sebagai pulau-pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 orang, dan secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland*), memiliki batas fisik yang jelas, dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insuler. Pulau kecil biasanya juga mempunyai sejumlah besar jenis endemik dengan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil, sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut. Sementara itu dari segi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Pulau-pulau kecil atau gugusan pulau adalah kumpulan pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis, sehingga dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumberdaya pesisirnya.

Sementara itu dalam literatur internasional juga dikenal konsep insularitas ekonomi dan insularitas biologis. Insularitas ekonomi terjadi ketika perkembangan wilayah hanya terjadi di sebagian kecil zona yang kadang-kadang dikenali sebagai pusat pertumbuhan pada wilayah yang semestinya terbelakang (Biagini and Hoyle, 1999). Insularitas ekonomi semacam ini sebagian terjadi karena dampak dari insularitas morfologis. Meskipun pandangan ini bersifat sangat deterministik, tetapi dapat dibuktikan secara empirik adanya bukti-bukti bahwa insularitas ekonomi sangat ditentukan oleh insularitas morfologisnya. Sebagian pengalaman di KTI dapat diambil sebagai contoh klasik wilayah dengan derajat insularitas ekonomi yang tinggi akibat insularitas morfologisnya yang sebagian sangat ekstrim. Insularitas morfologis yang ekstrim juga seringkali membawa akibat insularitas biologis dan kultural. Insularitas morfologis yang ekstrim memiliki efek pada miskinnya ragam spesies biologis yang juga paralel dengan masyarakat manusia yang statis, tetapi juga sebaliknya membawa implikasi masih adanya orisinalitas spesies biologis dan kondisi

Pada tingkat global wilayah kepulauan dengan insularitasnya yang tinggi telah mengalami perubahan peran yang sangat mendasar dari waktu ke waktu. Pada abad pertengahan wilayah-wilayah kepulauan merupakan pusat peradaban yang penting namun hanya memiliki pengaruh lokal di sekitarnya akibat kecilnya skala kegiatan yang dapat diciptakan berbasis lingkungan wilayah pulau. Banyak di antara wilayah kepulauan dunia memainkan peran sebagai titik transit dan pemasok perbekalan bagi kapal-kapal yang singgah. Beberapa wilayah kepulauan bahkan berkembang sebagai pusat dunia seperti Inggris Raya dengan sembojannya: *Who rules the waves rules the world* (Biagini and Hoyle, 1999).

Mulai abad ke-19 wilayah kepulauan menjadi arena *frontier* yang sangat menantang untuk perluasan kegiatan-kegiatan perdagangan, strategi militer, dan kegiatan ilmiah pada lingkup global. Studi tentang wilayah kepulauan telah memberikan efek pada penemuan-penemuan besar bidang ilmu pengetahuan termasuk di antaranya oleh Darwin dan Wallace. Kemajuan di bidang teknologi perkapalan telah memberikan kemajuan besar yang membawa berkah bagi banyak wilayah kepulauan melalui integrasi wilayah-wilayah tersebut dalam jaringan transportasi laut secara global. Demikian juga strategi militer negara-negara *superpower* saat itu juga banyak yang menggunakan wilayah-wilayah kepulauan sebagai basis pangkalannya (Tangredi, 2001).

Meskipun demikian mulai abad ke-20 sampai saat ini kejayaan peranan wilayah-wilayah insuler dalam lingkup dunia mulai menurun. Meningkatnya tingkat kemandirian kapal laut maupun pesawat udara baik sipil maupun militer dalam memenuhi kebutuhan logistiknya telah menurunkan secara drastis relatif pentingnya wilayah kepulauan. Pesawat udara dan kapal laut yang dibangun tidak lagi banyak bergantung pada terminal pengisian bahan bakar di wilayah-wilayah kepulauan. Mesin uap kapal sudah digantikan dengan mesin-mesin baru yang lebih efisien, demikian juga terjadinya perkembangan teknologi mesin pesawat udara yang semakin jauh daya jelajahnya secara bersama-sama telah mengakibatkan penurunan pentingnya wilayah kepulauan di muka bumi (Biaggini et al, 1999). Selain itu, dalam literatur juga dikenal istilah insularitas biologis sebagai perkembangan ragam spesies di satu wilayah kepulauan yang masih terjaga keasliannya. Insularitas biologis seringkali terjadi mengikuti terjadinya insularitas morfologis. Keterpencilan secara fisik juga sekaligus memberikan peluang munculnya insularitas kultural, yang berupa perkembangan kondisi sosio-kultural masyarakat yang statis karena rendahnya derajat interaksi dengan wilayah lain. Insularitas fisik tampaknya merupakan penyebab dari berbagai kemungkinan munculnya insularitas ekonomi, biologis, maupun kultural secara simultan.

INSULARITAS DAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA

Secara teoretik pengembangan ekonomi wilayah insuler dengan dominasi pulau-pulau berukuran kecil seperti di Indonesia akan menghadapi berbagai kendala yang sangat kompleks. Benedict (1967) hampir 40 tahun yang lalu memberikan uraian yang mendalam tentang berbagai kendala pembangunan di wilayah kepulauan. Menurut Benedict (1967) kendala-kendala tersebut adalah:

mbangunan wilayah semacam ini yang telah diteliti oleh berbagai ilmuwan lain adalah ala ekonomi dan potensi aglomerasi yang kecil (de Haan, 1993 dan Winters and Martin, 2003), isolasi fisik dan sosial (Euroisles, 2003), dinamika kependudukan yang lamban dan ruginya migrasi keluar (Lockhart, 1993 dan 1993a), terbatasnya peluang diversifikasi (oon, 1990), dan terbatasnya potensi air tanah Graenger (1983). Bahkan khusus untuk ndonesia terdapat penelitian yang intensif mengenai integrasi wilayah nasional dari Drake (1989). Hal ini masih diperburuk lagi dengan kondisi musim yang memberikan kendala da penyelenggaraan berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, Bass and Dalal-layton, (1995) memberikan penekanan yang kuat untuk mengedepankan keberlanjutan aripada pertumbuhan ekonomi di wilayah pulau-pulau kecil. Selanjutnya dalam rangka enghadapi globalisasi wilayah pulau-pulau kecil menjadi semakin rentan terhadap erubahan-perubahan fisik maupun ekonomi skala global (World Bank, 2000). Dalam onteks negara-negara kepulauan yang berukuran kecil perubahan-perubahan dalam entuk pemanasan global dan arus investasi global, misalnya, hampir dapat dipastikan ecara langsung memberikan dampak buruk bagi kehidupan di wilayah-wilayah tersebut ang selalu ada pada posisi terpengaruh, tanpa dapat mempengaruhi berlangsungnya berbagai proses berskala global tersebut.

Faktor-faktor tersebut bekerja secara simultan memberikan kendala yang sangat besar bagi setiap usaha pengembangan ekonomi wilayah kepulauan. Secara garis besar bekerjanya faktor-faktor tersebut dalam menghambat perkembangan ekonomi pada wilayah insuler di Indonesia sebagaimana diperoleh dari berbagai studi empirik yang ada dapat diuraikan sebagai berikut ini.

a. Skala Ekonomi yang Kecil

Dari pengalaman di wilayah Kepulauan Natuna (PSPPR UGM, 2002) dan Pulau Seram (PPPN UGM, 1997 dan PSPPR UGM, 2003) diperoleh pelajaran bahwa salah satu hambatan penting dalam pengembangan berbagai usaha termasuk perikanan dan wisata bahari sebagai sektor ekonomi penting di wilayah kepulauan adalah persoalan skala usaha yang terlalu kecil. Kecilnya skala usaha perikanan berakibat sulitnya nelayan setempat untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan skala usaha yang ada tampaknya sangat sulit untuk dapat dicapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada kebutuhan subsisten sehingga persoalan menjadi ini semakin sulit untuk diatasi. Persoalan kemiskinan pada masyarakat nelayan seringkali menjadi sangat kronis, karena nelayan seringkali harus mengkonsumsi lebih tinggi daripada yang dapat diproduksinya terutama pada saat-saat paceklik di musim barat ketika nelayan tidak dapat melaut.

Pada tingkat wilayah pun permasalahan disekonomi skala juga ditemukan dalam kaitannya dengan takdir geografi wilayah kepulauan terutama pada wilayah-wilayah kepulauan ukuran kecil baik dari segi jumlah penduduk maupun luas wilayah daratannya yang tersebar saling berjauhan satu gugus pulau dengan gugus yang lainnya. Luas wilayah daratan yang kecil dan berserakan lokasinya mengakibatkan jumlah dan kelompok penduduk dapat dikomodasi dalam tingkat kehidupan yang layak menjadi sangat terbatas

beli dan struktur produksinya juga tidak cukup besar sebagai pasar produk-produk perikanan yang tersedia. Lemahnya daya beli dan struktur produksi wilayah yang cenderung homogen tidak memberikan ruang yang cukup bagi kegiatan sirkulasi dan pertukaran dalam suatu siklus produksi secara sistemik. Selain itu khusus di Kabupaten Natuna (PSPPR UGM, 2003) terdapat kendala lain yaitu suasana kegiatan ekonomi perikanan yang seringkali dililit monopoli kelompok-kelompok minoritas tertentu yang menjadi penyebab tidak dapat berkembangnya usaha-usaha ekonomi nelayan tradisional yang ada saat ini.

b. Isolasi Fisik dan Sosial

Keterisolasian wilayah-wilayah kepulauan membawa konsekuensi tingkat interaksi dengan wilayah lain yang juga sangat rendah (Hayes et al, 1998). Jauhnya jarak antarwilayah pulau-pulau kecil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang cukup besar juga menambah permasalahan pengembangan wilayahnya. Terbatasnya intensitas interaksi ini juga tercermin dari kecilnya frekuensi penerbangan maupun pelayaran dari dan menuju wilayah kepulauan yang berukuran kecil dan terpencil seperti Kabupaten Maluku Tenggara (PSPPR UGM, 2003a). Berbagai komoditas yang diproduksi di Kabupaten Natuna, misalnya, baik dari segi sifat maupun volumenya belum mampu membangkitkan adanya interaksi yang lebih intensif dengan pusat-pusat ekonomi lainnya (PSPPR UGM, 2002). Komoditas-komoditas seperti ikan laut atau kelapa yang tersedia dalam volume yang tidak cukup besar cenderung saling berkompetisi dengan produk-produk sejenis di wilayah-wilayah pulau kecil sekitarnya sehingga interaksi dalam bentuk pertukaran produksi antarwilayah tidak pernah terwujud. Dari observasi lapangan di Kepulauan Natuna dapat diamati bahwa banyak petani membiarkan kelapanya berjatuh di kebun tanpa dipungut dan dibiarkan tumbuh menjadi batang kelapa baru. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kompetisi antarwilayah, maka wilayah dengan jarak terjauh dari pusat ekonomi utama dan dengan skala usaha yang terkecil akan cenderung terkalahkan secara alamiah. Pasokan kelapa di wilayah Pontianak dan sekitarnya selama ini dapat dicukupi oleh wilayah sekitarnya, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan kelapa dari Natuna.

c. Migrasi Keluar dan Dinamika Kependudukan

Ciri lain yang juga melekat pada wilayah kepulauan adalah lambannya dinamika perkembangan dan struktur kependudukan. Wilayah ini di sisi lain justru dicirikan dengan besarnya angka migrasi keluar dan kecilnya migrasi masuk. Migrasi keluar yang tinggi dari masyarakat di wilayah pulau kecil telah menjadi tradisi yang berlangsung lama dan sangat tipikal terjadi wilayah-wilayah kepulauan kecil (*born to migrate*). Daerah tujuan utama migrasi yang merupakan kota-kota besar di bagian wilayah Pulau Jawa (Rijanta, 2002)

Kondisi wilayah kepulauan dengan keterbatasan-keterbatasan alamiahnya ternyata membawa konsekuensi yang besar pada perilaku migrasi penduduknya (PSPPR UGM, 2003).

Dengan demikian perkembangan jumlah dan kelompok penduduk di wilayah semacam ini cenderung lambat, dengan struktur yang memberat pada kelompok usia non-produktif terutama pada kelompok laki-laki. Konsekuensi lebih lanjut dari tingginya angka migrasi keluar adalah struktur penduduk menurut kelompok umur yang didominasi kelompok umur non-produktif. Pada kelompok umur muda dan tua proporsi penduduk cenderung dominan, sedangkan pada kelompok usia produktif terjadi defisit. Ketersediaan sumberdaya manusia alam jumlah dan kualifikasi yang memadai untuk berbagai kegiatan pembangunan merupakan tantangan terberat yang sangat pelik pemecahannya. Dari segi kualitas fisiknya penduduk di provinsi-provinsi bagian timur Indonesia juga menunjukkan tingkatan yang lebih rendah (UNDP, 2000). Selain itu wilayah kepulauan di Kawasan Timur Indonesia juga memiliki ciri-ciri keragaman etnik yang tinggi dan cenderung memiliki *ethnic prejudice* yang tinggi serta memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap pendatang. Demikian juga pada lingkup internasional migrasi keluar dari wilayah pulau-pulau kecil juga cenderung dominan (Briguglio, 2001; Lockhart, 1993; King, 1999).

1. Terbatasnya Peluang Diversifikasi

Konsekuensi lain dari lokasi yang terpencil dan ukuran wilayah daratan yang kecil ialah terbatasnya kemungkinan melakukan diversifikasi ekonomi (PPPPN UGM, 1997 dan PSPPR UGM, 2003). Produksi yang ada cenderung homogen dan antarwilayah dalam kepulauan tidak terdapat keragaman struktur produksi yang memadai, sehingga cenderung memperkecil peluang terjadinya pertukaran antarwilayah yang sekaligus membatasi peluang perkembangan ekonomi yang berbasis pada kekuatan sendiri. Sementara itu dalam interaksinya dengan wilayah lain, wilayah kepulauan kecil cenderung kurang kompetitif sebagai akibat inefisiensi dalam proses produksinya. Inefisiensi dalam proses produksi di wilayah yang terpencil terutama muncul dari tingginya biaya transportasi bahan baku maupun pemasaran produksi. Untuk budidaya komoditas-komoditas tertentu yang tidak tahan lama kondisi semacam ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi produsen di wilayah pulau-pulau kecil.

Kecilnya skala produksi yang dapat dikembangkan di satu sisi dan keinginan untuk mengembangkan ekonomi secara cepat di sisi lainnya bukanlah dua hal yang dapat dipertemukan secara komplementer. Skala produksi yang kecil cenderung menghambat pengembangan ekonomi skala besar yang dibutuhkan wilayah untuk tumbuh dan berkembang secara cepat, tetapi jika pertumbuhan dipaksakan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar di wilayah ini beberapa kendala alamiah dan kelangkaan sumberdaya manusia dapat muncul segera. Keterbatasan sediaan air tanah dan risiko kerusakan lingkungan yang tinggi serta kelangkaan sumberdaya manusia yang terampil dan

Beberapa pengalaman (PSPPR UGM, 2002) menunjukkan bahwa hambatan kultural dalam pengembangan ekonomi modern masih saja ditemukan di wilayah dengan insularitas yang tinggi.

e. Terbatasnya Sedian Air Tawar untuk Kegiatan-kegiatan Ekonomi Skala Besar

Permasalahan kelangkaan air tawar di wilayah kepulauan kecil muncul sebagai akibat kecilnya wilayah tangkapan air itu sendiri. Dengan ukuran wilayah daratan yang kecil, hampir secara otomatis daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan hujan yang ada hanya berukuran kecil-kecil saja. Hal ini juga dapat diperparah lagi oleh struktur dan sifat-sifat fisik-geologis wilayah kepulauan yang tidak dapat menahan air dalam jangka waktu yang lama (PSPPR UGM, 2002). Dengan demikian, air tawar yang tersedia biasanya sangat terbatas, sehingga berkembangnya penduduk dalam jumlah yang terlalu besar atau munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang membutuhkan air tawar dalam jumlah besar perlu selalu diwaspadai. Situasi seperti ini juga sekaligus menjadi kendala jika skala ekonomi wilayah akan ditingkatkan dengan jumlah penduduk yang lebih besar atau jika pengembangan ekonomi akan dipercepat dengan usaha-usaha ekonomi skala besar. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi di wilayah pulau-pulau kecil perlu selalu mempertimbangkan ketersediaan air tawar secara berlanjutan. Kekeliruan dalam pengelolaan air tanah di wilayah kepulauan skala kecil akan berakibat intrusi air laut yang sulit terpulihkan yang sekaligus berarti ancaman nyata bagi kelestarian kehidupan di tempat itu (Graenger, 1983).

Satu hal yang perlu memperoleh penekanan secara khusus dalam hal ini ialah adanya fakta bahwa air bersih merupakan kendala terpenting dari kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar yang membutuhkan adanya aglomerasi penduduk yang besar pula (PSPPR UGM, 2003a). Apalagi jika jumlah penduduk yang besar tersebut selanjutnya berkembang menjadi suatu kota yang besar dan padat penduduknya, maka kerusakan lingkungan wilayah pulau kecil akan segera terjadi bahkan menuju kerusakan yang tidak mudah terpulihkan sebagai konsekuensi tingginya kerentanan lingkungan wilayah kepulauan terhadap gangguan-gangguan eksternal. Dengan demikian, gagasan pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah kepulauan seperti ini selalu dibayangi dengan risiko kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketersediaan air bagi kehidupan di wilayah kepulauan itu sendiri tampaknya menjadi faktor yang paling menentukan untuk pemilihan jenis dan skala kegiatan pembangunan yang berlanjutan.

f. Kuatnya Pengaruh Musim pada Kegiatan Ekonomi dan Kerentanan Terhadap Bencana

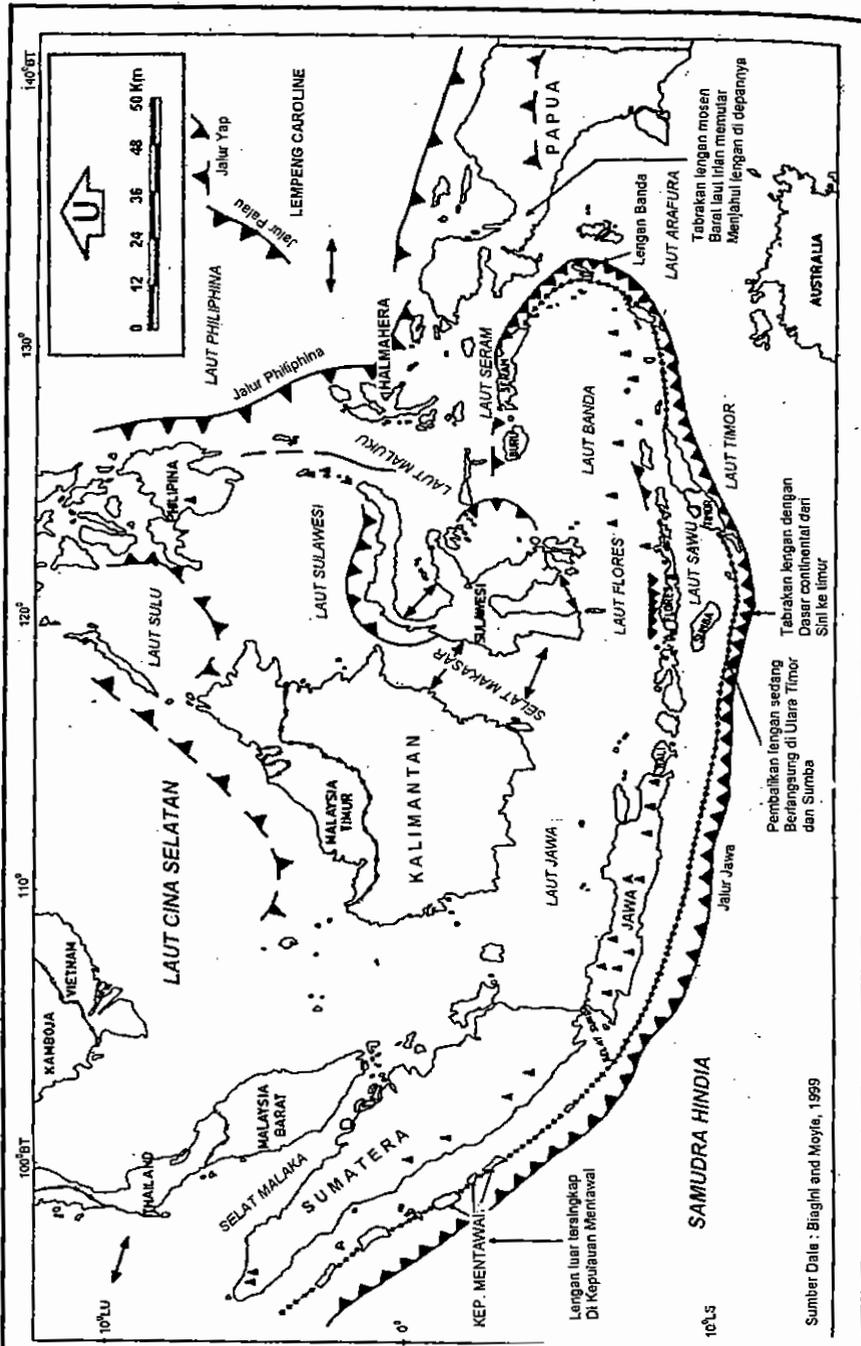
Karakteristik lain wilayah-wilayah kepulauan yang membuatnya sulit untuk berkembang ialah sifat alamnya yang cenderung musiman. Pada musim-musim barat biasanya angin bertiup kencang, ombak sangat tinggi dan cuaca kurang menguntungkan untuk melaut, sehingga praktis pada musim-musim seperti ini kegiatan ekonomi utama

kemungkinan melakukan diversifikasi usaha masih terbatas, masyarakat wilayah kepulauan cenderung menggangu pada musim-musim yang tidak menguntungkan tersebut. Dalam kaitannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, kondisi iklim yang demikian tampaknya turut mengkondisikan terjadinya kemiskinan, isolasi fisik dan sosial, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan.

Selain itu wilayah pulau-pulau kecil merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki kerentanan terhadap bencana yang tertinggi. Keterbukaan wilayahnya di laut bebas membuatnya menjadi wilayah yang mudah terserang oleh bencana yang muncul dari laut, baik yang disebabkan oleh proses tektonik maupun vulkanik dengan berbagai bencana turunannya. Pulau-pulau kecil di Indonesia secara geologis banyak yang terletak di sekitar jalur gempa tektonik maupun vulkanik (Biagini and Hoyle, 1999). Pada jalur ini bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor maupun angin ribut dapat terjadi dan membawa korban jiwa dan kerusakan asset yang serius (Gambar 1). Pada wilayah pulau-pulau kecil di negara maju, usaha asuransi dapat menjamin pemulihan asset dari kerusakan maupun menanggung risiko kerugian akibat terjadinya korban jiwa. Namun untuk kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, kerusakan akibat bencana alam di wilayah pulau-pulau kecil merupakan kehilangan asset yang seringkali tidak terpulihkan. Sementara kemampuan ekonomi masyarakat belum dapat menanggung premi asuransi yang biasanya sangat tinggi atau bahkan tidak pernah ada perusahaan asuransi yang berani memasuki bisnis di tempat semacam ini.

g. Konflik antara Kebutuhan Pelayanan dan Jumlah Penduduk Ambang

Satu persoalan terbesar yang dihadapi wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia adalah konflik antara kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana di satu sisi dengan jumlah penduduk ambang (*threshold*). Secara konvensional kebutuhan sarana dan prasarana wilayah diberikan oleh pemerintah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk. Dalam konteks wilayah kepulauan dengan insularitas yang ekstrim akan terlihat bahwa infrastruktur sangat kurang, karena jumlah penduduk yang ada tidak cukup besar untuk mendukung secara efisien beroperasinya infrastruktur tertentu. Jika standard normatif perencanaan infrastruktur yang konvensional diterapkan secara kaku, hampir dapat dipastikan wilayah pulau-pulau kecil tidak akan pernah memperoleh alokasi proyek, sehingga akan selalu terbelakang dalam ketersediaan infrastruktur. Selain itu sentralisasi dalam pembuatan keputusan alokasi sumberdaya pembangunan yang berlangsung selama ini tampaknya masih cenderung memiliki kontribusi yang besar yang mengakibatkan keterbelakangan wilayah pulau-pulau kecil seakan tidak akan pernah dapat diselesaikan. Kemauan politik pemerintah untuk memberikan perhatian khusus di wilayah pulau-pulau kecil atau kawasan timur Indonesia pada tingkat nasional tampaknya tidak serta-merta diikuti dengan realokasi sumberdaya pembangunan secara proporsional. Konsentrasi investasi masih saja terjadi di wilayah-wilayah Jawa. Dasar, Tenggung dan Bekas yang menerima lebih dari 60



Gambar 1. Posisi Geologis Pulau-Pulau di Indonesia pada Wilayah Potensial Bencana Alam

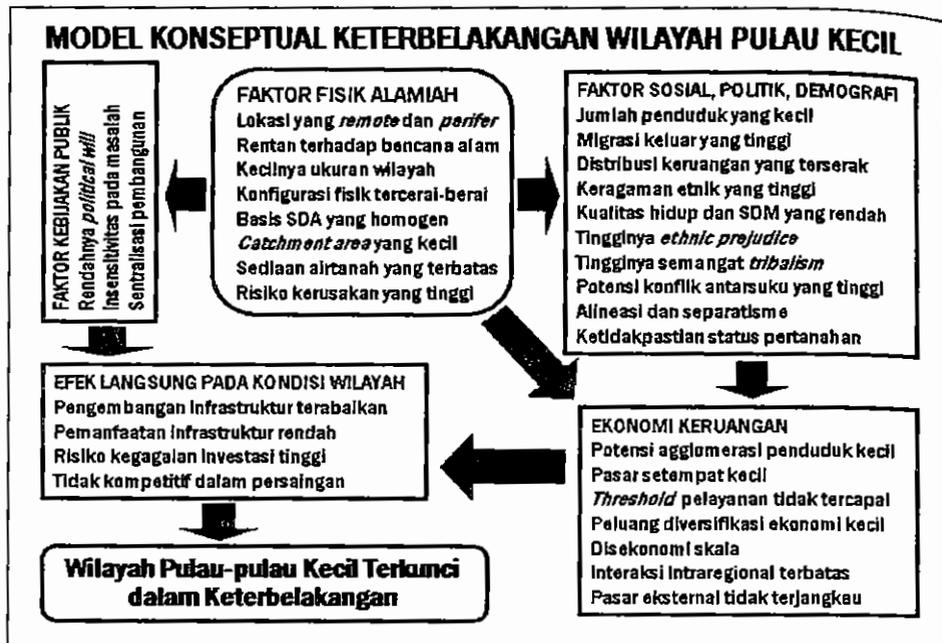
Sumber Data : Biagini and Moyle, 1999

Dari pengalaman di Provinsi Maluku, penyediaan infrastruktur seperti energi listrik dan air bersih harus disubsidi dengan dana yang sangat besar oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menyediakan kedua kebutuhan dasar tersebut tidak akan mampu beroperasi secara efisien dengan kecilnya jumlah penduduk yang ada beserta daya belinya yang rendah (PSPPR UGM, 2003). Demikian juga pada tingkatan yang lebih rendah, dilema antara kelangkaan pelayanan sosial seperti rumah sakit atau sekolah menengah dengan jumlah penduduk yang kecil juga dapat ditemukan di hampir semua wilayah pulau-pulau kecil yang tersedia datanya (PPPPN UGM, 1997, PSPPR UGM 2002 dan 2003). Oleh karena itu tampaknya moda pelayanan berbagai jenis fasilitas perlu disesuaikan dengan konfigurasi fisik wilayah yang tercerai-berai. Moda pelayanan keliling sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi dilema tersebut, meskipun dalam beberapa hal moda pelayanan seperti ini mengandung beberapa keterbatasan.

MODEL KONSEPTUAL KETERBELAKANGAN EKONOMI WILAYAH PULAU-PULAU KECIL

Berdasarkan pembahasan tentang beberapa hasil penelitian empirik di Indonesia, sebuah model konseptual tentang keterbelakangan wilayah insular dapat dibangun. Model ini dibuat berdasarkan hubungan logis antara berbagai fakta empirik yang diidentifikasi dari berbagai hasil penelitian empirik yang telah dibicarakan pada bagian sebelumnya. Model konseptual ini dibangun di atas suatu dasar asumsi yang sangat deterministik, bahwa sebagian besar aktivitas manusia di wilayah pulau-pulau kecil sangat ditentukan oleh faktor fisik alamiah yang dimiliki wilayah tersebut. Dengan demikian dalam model ini kondisi fisik alamiah wilayah pulau-pulau kecil diperlakukan sebagai pangkal tolak dari munculnya berbagai masalah kehidupan di wilayah semacam ini (Gambar 2).

Beratnya tantangan kondisi fisik alamiah di wilayah pulau-pulau kecil yang kemudian dihadapkan pada faktor kebijakan yang kurang kondusif (seperti rendahnya kemauan politik, insensitivitas pada persoalan dan sentralisasi pembuatan keputusan) pada gilirannya secara simultan menghasilkan kondisi fisik binaan yang terbelakang seperti yang teramati saat ini, termasuk dalam hal ini adalah infrastruktur fisik wilayah. Sementara itu, akibat adanya dilema jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan, dapat diamati juga adanya paradoks di beberapa bagian wilayah pulau kecil karena infrastruktur yang sudah ada justru terkesan tidak dapat dimanfaatkan secara optimum (*under utilized*) baik akibat rendahnya jumlah penduduk pengguna maupun rendahnya tingkat produksi yang perlu dilayani oleh infrastruktur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, jika dipaksakan untuk dibangun infrastruktur di wilayah pulau-pulau kecil yang tidak memiliki ambang jumlah penduduk yang cukup, maka inefisiensi akan terlihat dalam bentuk rendahnya



Gambar 2. Visualisasi Model Konseptual Keterbelakangan Wilayah Pulau Kecil

Pada sisi yang lain faktor fisik wilayah memiliki konsekuensi langsung pada dua hal berikut: (1) struktur sosial, politik, dan demografi serta (2) ekonomi-keruangan. Struktur sosial, politik dan demografi yang tipikal dimiliki oleh wilayah pulau-pulau kecil cenderung tidak kondusif untuk berjalannya upaya-upaya pengembangan wilayah. Keragaman etnik yang tinggi, migrasi keluar yang tinggi, kualitas sumberdaya manusia yang rendah dan tingginya *ethnic prejudice*, serta ketidakpastian status pertanahan, misalnya, dapat disebut sebagai bagian dari komponen struktur sosial, politik dan demografi tersebut. Kondisi ekonomi keruangan wilayah pulau kecil juga secara signifikan membuat wilayah semacam ini tidak menarik bagi para investor. Kelangkaan infrastruktur dan terbatasnya pasar setempat biasanya merupakan faktor penghambat langsung yang dihadapi investor. Interaksi antarwilayah yang kecil, peluang diversifikasi produksi yang kecil, skala usaha dan agglomerasi penduduk yang kecil mengakibatkan kesulitan yang sangat signifikan untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi secara organik, tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan. Kedua hal ini juga bermuara pada keterbelakangan wilayah bersama-sama dengan rendahnya kemauan politik pemerintah.

Akhirnya, persoalan-persoalan fisik wilayah, struktur sosial, politik, demografi, dan ekonomi keruangan wilayah pulau kecil akan menyebabkan... (text is partially cut off)

us diperlakukan sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah semacam ini. Meskipun demikian, jika dirunut secara jernih pangkal semua masalah keterbelakangan wilayah pulau-pulau kecil sebenarnya terletak pada kondisi takdir geografi fisik yang memang tidak ramah untuk berjalannya kehidupan yang normal. Sementara itu masalah-masalah sosial, politik, demografi, dan ekonomi-keuangan pada dasarnya merupakan masalah turunan dari kondisi fisik geografis yang tidak menguntungkan. Selanjutnya tidak semua faktor kendala fisik alamiah yang ada dapat diatasi secara sempurna. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengembangkan wilayah pulau-pulau kecil justru harus mengedepankan keselamatan wilayah dan penghuninya secara keseluruhan daripada target-target pencapaian ekonomi berjangka pendek.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Wilayah pulau-pulau kecil mengalami keterbelakangan ekonomi karena takdir kondisi fisik wilayah yang memungkinkan bekerjanya elemen-elemen sosial, politik dan demografi serta keruangan secara sinergis dalam pembangunan. Bahkan setiap elemen cenderung bekerja saling berlawanan terhadap elemen lainnya, sehingga dalam upaya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil banyak sekali dilema dan paradoks yang tidak mudah dicari komprominya. Dilema dan antara tuntutan pembangunan ekonomi yang harus tumbuh pesat untuk mengejar ketertinggalan dan integritas ekologi pada lingkungan alam yang rapuh, dilema antara tuntutan pemasaran yang cepat untuk komoditas-komoditas pertanian dan perikanan yang diproduksi dengan skala usaha yang kecil dan inefisiensi transportasi pemasaran ke pusat pasar yang berjarak jauh, dilema antara jumlah penduduk yang kecil, jarak jangkauan pelayanan dan tuntutan kebutuhan pelayanan sosial, dilema antara keterbukaan ekonomi wilayah dan posisi tawar menawar yang rendah merupakan beberapa contoh kesulitan besar yang dihadapi wilayah pulau-pulau kecil. Dilema-dilema tersebut semuanya berpangkal pada kondisi wilayah yang secara fisik tidak dapat menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi secara efisien melalui mobilisasi berbagai faktor produksi secara sistemik, baik pada tingkat wilayah maupun rumahtangga. Hampir setiap upaya optimasi di satu bidang kehidupan akan secara langsung menuntut pengorbanan pada bidang yang lain, atau dengan perkataan yang lain di wilayah pulau-pulau kecil ini sangat jelas berlaku kaidah *zero sum game*. Semakin kuat upaya optimasi di satu bidang, semakin besar pula korbanan yang harus dilakukan pada bidang yang lain.

Model yang dibangun pada bagian akhir penelitian ini dilandasi suatu asumsi determinisme lingkungan yang lazimnya berlaku di wilayah pulau-pulau kecil. Faktor fisik wilayah merupakan kendala terbesar yang kemudian menurunkan berbagai masalah pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil. Model di atas juga berusaha menunjukkan keterkaitan antar elemen tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam

ini dapat diperoleh pelajaran penting bahwa pembangunan wilayah pulau-pulau kecil hendaknya menempatkan keberlanjutan kehidupan wilayah dan integritas ekologis sebagai tujuan terpenting. Sementara itu orientasi pembangunan sosial perlu memperoleh prioritas yang tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya agar mampu berkembang sebagai masyarakat yang mandiri dalam lingkungan wilayah pulau-pulau kecil. Dengan demikian sektor-sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi perlu memperoleh perhatian khusus. Sementara itu orientasi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tampaknya harus ditempatkan pada prioritas yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, Stephen and Barry Dalal-Clayton, 1995. Small Island States and Sustainable Development: Strategic Issues and Experience. *Environmental Planning Issues*. No. 8, September 1995. London: International Institute for Environment and Development.
- Benedict, Burton (Ed), 1967. *Problems of Small Territories*. London: University of London.
- Biagini, Emilio, Bryan Hoyle (Eds), 1999. *Insularity and Development: International Perspectives on Islands*. London and New York: Pinter.
- Briguglio, Emilio, 2001. The Vulnerability Index. *AOSIS Workshop on Trade, Sustainable Development and Small Island Developing States*. Montego Bay, Jamaica. 12-15 December 2001.
- Cosmas Batubara, 2003. Konsep Geopolitik dan Implikasinya dalam Mereduksi Konflik di Indonesia. Paper Disampaikan dalam *Lokakarya Nasional Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem untuk Mereduksi Konflik Antardaerah*. Lustrum VIII Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 30 Agustus 2003.
- de Haan, Leo J., 1993. Small Islands in the Carribean, the Last Remains of the Tropical Netherlands: The Netherlands Antiles and Aruba. *Tijdschrift voor Economie en Sociaal Geographie*. Vol 84, No. 5. pp: 378-385.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002). *Naskah Akademik Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Drake, Christine, 1989. *National Integration in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Euroisles, 2003. *Insularity: Pervasive and Permanent Reality*. <http://www.euroisles.org/field.htm> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2003.
- Graenger, Orman E., 1983. The Hydroclimatology of a Developing Tropical Island: A Water Resource Perspective. *Annals of the Association of American Geographers*. Vol 73, Issue 2. June 1983. pp: 183-205.
- Hayes, Adrian C, Suko Bandiyono dan Gavin W. Jones, 1998. Kondisi Wilayah. dalam Jones, Gavin dan Yulifita Rahardjo (Eds). 1998. *Penduduk. Lahan dan Laut: Tantangan*

- es, Gavin dan Yulfita Rahardjo, 1998. *Penduduk, Lahan dan Laut: Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- ig, Russel, 1999. Island and Migration. In Biagini, Emilio, Bryan Hoyle (Eds). 1999. *Insularity and Development: International Perspectives on Islands*. London and New York: Pinter.
- ckhart, Douglass, 1993. Island Environments: Legacies Constraints and Development Problems. *Tijdschrift voor Economie en Sociaal Geographie*. Vol 84, No. 5. pp: 322-331.
- ckhart, Douglass, 1993. Guest Editorial: Island Problems, Policies and Prospects. *Scottish Geographical Magazine*. Vol 103. No. 3. pp: 130-132.
- on, Auliana, 1990. Flexible Specialisation and Small Size: The Case of Caribbean Tourism. *World Development*. Vol 18. No. 1. pp: 109-123.
- usat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional, Universitas Gadjah Mada, 1996. *Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Buton, Kolaka dan Kendari (BUKARI), Provinsi Sulawesi Tenggara*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: PPPPN UGM dan BAPEDA Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- usat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional, Universitas Gadjah Mada, 1997. *Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Pulau Seram*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: PPPPN UGM dan Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- usat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, Universitas Gadjah Mada, 2002. *Evaluasi Pembangunan dan Penyusunan Basis Data Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2002*, Laporan Penelitian. Yogyakarta: PSPPR UGM dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.
- Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, Universitas Gadjah Mada, 2003. *Penyusunan Rencana Strategis Provinsi Maluku Tahun 2003*. Yogyakarta: PSPPR UGM dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.
- Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, Universitas Gadjah Mada, 2003a. *Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram, Provinsi Maluku 2003*. Yogyakarta: PSPPR UGM dan BP Kapet Provinsi Maluku.
- Rijanta, R., 2002. Hubungan Migrasi dan Pembangunan Regional di Indonesia (Keragaman Perspektif, Kondisi Empirik dan Prospeknya dalam Era Otonomi Daerah). *Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Mobilitas Penduduk dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tanggal 9 Februari 2002.
- Riwanto Tirtosudarmo, 1998. Beberapa Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia Timur. dalam Jones, Gavin dan Yulfita Rahardjo (Eds). 1998. *Penduduk, Lahan dan Laut: Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur*. Jakarta: Pustaka

- Tangredi, Sam J. (Ed), 2001. *Maritime Power and Globalization*. Washington: Institute for Defense Study, National Defense University.
- UNDP, 2002. *Human Development Report Indonesia 2001*. Jakarta: UNDP.
- Winters, Alan L and Pedro M.G. Martins, 2003. *Beautiful but Costly: Business Cost in Small Economies*. London: Commonwealth Secretariate.
- World Bank, 2000. *Small States: Meeting Challenges in the Global Economy*. Report of the Commonwealth Secretariat and the World Bank Joint Task force on Small States. Washington: World Bank.